

SOCIAL NETWORK ANALYSIS TERKAIT IMPLEMENTASI SISTEM KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSEPEKTIF PENANGANAN COVID-19

SOCIAL NETWORK ANALYSIS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE COUNTRY DEFENSE HEALTH SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF HANDLING COVID-19

Doi: [HTTPS://DOI.ORG/10.52617/JAID.VIII.231](https://doi.org/10.52617/jaid.viii.231)

Submitted: 01-07-2022 Reviewed: 01-08-2022 Published: 10-08-2022

Ohan Suryana
ohansuryana3@gmail.com
BPSDM Hukum dan HAM

Bobby Briando
bobby_briando@yahoo.com
Politeknik Imigrasi

Muhamad Ali Embi
Ali@uum.edu.my
Universiti Utara Malaysia

Abstract. *The purpose of writing this article is to see the extent to which the public has made efforts to tackle efforts to deal with the 2019 Corona Virus (Covid-19) as an implementation of the state defense health system. In the defense system, the State must pay attention to the Global Health Security Agenda (GHSA) which is a global challenge that is currently the world's main concern. GHSA is a pendulum of tug-of-war problems of world health security, which penetrates the national and regional dimensions of each country. This study used a qualitative method with big data analysis in the form of an Emprit Academic (DNA) Drone. The results showed that the covid-29 handling task force had paid attention to this aspect. This can be seen from the fulfillment of the supporting elements in its implementation. The public response also has a positive trend in assessing the performance of the task force.*

Keywords: Covid-19, Task Force, DEA Analysis

Abstrak. *Penulisan artikel ini bertujuan dalam rangka melihat sejauh mana publik memberikan suatu respon terhadap upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai implementasi sistem kesehatan pertahanan negara. Dalam sistem pertahanan Negara harus memperhatikan Global Health Security Agenda (GHSA) yang merupakan tantangan global saat ini yang menjadi perhatian utama dunia. GHSA menjadi pendulum tarik ulur problematika keamanan kesehatan dunia, yang merambah area dimensi nasional dan regional masing-masing Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan big data analysis berupa Drone Emprit Academic (DNA). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya satuan gugus tugas penanganan covid-29 telah memperhatikan aspek tersebut. Hal ini terlihat dari telah terpenuhinya unsur-unsur pendukung dalam pelaksanaannya. Respon publikpun memiliki tren positif dalam menilai kinerja gugus tugas.*

Kata Kunci: Covid-19, Gugus Tugas, DEA Analysis



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Bencana pandemic Corona Virus Disease (2019) yang berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat di hampir 217 negara di dunia juga dirasakan dampaknya di Indonesia. Sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 di Dunia pada awal bulan Januari 2020, menurut data dari *World Health Organization* (WHO) melalui lamannya covid19.who.int per tanggal 2 Juli 2021 terdapat 361.149 kasus baru sehingga total kasus terkonfirmasi secara global berjumlah 182.319.261 dengan tingkat kematian berjumlah 3.954.324 kasus. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri sejak kasus pertama ditemukan pada awal bulan Maret 2020 menurut data dari covid19.go.id per tanggal 4 Juli 2021 telah tercatat sebanyak 2.284.084 kasus terkonfirmasi dengan tingkat kematian berjumlah 60.582 kasus.

Dengan fokus pada peningkatan kasus pasien terpapar Covid-19, pemerintah merespons dengan cepat dalam menyiapkan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pembiayaan sejak kasus Covid-19 pertama ditemukan, tidak hanya dalam penanganan Covid-19. wabah pandemi Kondisi tanggap darurat kesehatan. 19, dan dalam mempersiapkan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multidimensi ini (Modjo 2020)

Perpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pokja Percepatan Covid-19 Tahun 2020 selanjutnya diubah melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan tanggung jawab dan keanggotaan Pokja Covid-19 dengan melibatkan partisipasi dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian/Lembaga Inilah bentuk khusus yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi bencana ini

Selain pembentukan satgas, peningkatan kasus pasien dan persebaran lokasi yang meningkat dari waktu ke waktu juga harus menjadi pertimbangan. Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa kerangka regulasi, dengan fokus pada penetapan status kedaruratan di bidang kesehatan masyarakat, yang diatur dalam Perpres No. 11 Tahun 2020. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan pembatasan yang melibatkan masyarakat berskala besar untuk mempercepat penanganan Covid-19 menjadi dasar hukum penetapan pembatasan sosial berskala besar. Implementasinya dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi dasar untuk menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar.

Selain kerangka regulasi terkait penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi Covid-19 yang meliputi pembangunan nasional tahun 2020. APBD dan APBD, Peraturan pemerintah kemudian dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang mengatur keuangan nasional yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mata uang yang terkena dampak bencana Covid-19.

Setelah memasuki new normal, dalam rangka memulihkan perekonomian nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19, berbagai kegiatan ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional telah dikurangi, dan stabilitas negara tetap terjaga. Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional..

Mengingat besarnya dampak epidemi Covid-19 terhadap tatanan kehidupan negara, maka perlu dirumuskan kebijakan pertahanan negara yang didasarkan pada kondisi objektif yang dihadapi negara. Untuk mendukung upaya tersebut, perlu dilakukan pengembangan kapasitas dan efisiensi sumber daya nasional di berbagai bidang, salah satunya di bidang

kesehatan..

Kemampuan suatu negara di bidang kesehatan pada dasarnya adalah keuletan dan ketahanan negara dan negara di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kapasitas bidang kesehatan nasional merupakan salah satu unsur dasar ketahanan nasional, dan kekuatan bidang kesehatan nasional merupakan salah satu daya dukung sistem pertahanan negara. Perlu terus mengembangkan dan mempersiapkan kekuatan negara di bidang kesehatan untuk mendukung kegiatan pertahanan negara dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.

Hal ini merupakan wujud dari Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keamanan seluruh negara dari ancaman dan gangguan terhadap negara dan keutuhannya.

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan negara yang dirumuskan oleh pemerintah sejak dini dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dilaksanakan secara menyeluruh, menyeluruh, tepat sasaran, dan berkesinambungan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Dan keselamatan seluruh negeri dari segala ancaman.

Kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental, spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan pertahanan negara berarti seluruh sumber daya bidang kesehatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk personel, sarana, prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta, yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Seiring dengan meluasnya penyebaran bencana Covid-19 dan berdampak pada sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, hal tersebut didukung oleh pernyataan World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 adalah tahun 2020 dengan global pandemi pada 11 Maret lalu, harus dicatat bahwa hal utama bagi masyarakat adalah menghadapi penyebaran Covid-19 dan mengatasinya. Hal ini tentunya akan melibatkan berbagai instansi untuk menanganinya (Nugroho 2020). Tentu yang menjadi perhatian utama adalah dinas kesehatan dan penanggulangan bencana. Namun, agen imigrasi juga memainkan peran penting dalam mengatasi epidemi ini. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa salah satu fungsi keimigrasian adalah berkaitan dengan keamanan negara, Undang-undang tersebut memberikan pengawasan keimigrasian di pintu masuk negara, prinsipnya adalah untuk menyelidiki, melindungi, dan memobilisasi orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk itu pengawasan yang super ketat di pintu masuk bandara ataupun pelabuhan internasional menjadi tanggungjawab Imigrasi

Tak pelak, dipimpin oleh Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Achmad Yurianto, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Satgas tersebut kerap mendapat perhatian publik. Bagaimana penyelenggaraan penanggulangan dan pembangunan bencana untuk menjaga pertahanan negara dan sistem kesehatan sebagai perhatian publik warga negara dan warga negara atau netizen.

Penulisan artikel ini dilakukan untuk melihat bagaimana tanggapan warganet terhadap percepatan penanganan *virus corona disease* (covid-19) yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gugus tugas sebagai implementasi sistem kesehatan pertahanan Negara untuk melindungi warga dari ancaman kesehatan global.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Metode deskripsi dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk digital (Muhadjir 2000). Metode kualitatif adalah proses sistematis penelitian ilmu sosial, yang memberikan ruang bagi peneliti untuk lebih mendekati kondisi nyata (Creswell 2016).

Penelitian ini mengambil data dari percakapan di media sosial. Ada dua cara pengambilan data yaitu yang pertama menggunakan bantuan python 3 yang dilakukan secara manual. Proses crawling terlebih dahulu memasukkan kata kunci “corona” dan “government” pada rentang dialog 9 April 2020 hingga 9 Agustus 2020. Oleh karena itu, ada sekitar 419.478 percakapan yang mengandung kata kunci tersebut dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul di database, selanjutnya diolah dengan bantuan PHP. Kemudian visualisasikan data untuk menyajikan grafik masalah trending dan analisis jaringan sosial (SNA). Untuk memetakan SNA Twitter dan masalah komunikasi, penulis menggunakan platform data besar yang disebut Drone Emprit Academic (DEA). Drone Emprit Academic adalah sistem big data yang dapat menangkap dan menganalisis percakapan di media sosial (khususnya Twitter). Sistem ini dikembangkan oleh PT Media Kernels Indonesia dan dipasang di data center Badan Sistem Informasi (BSI) Universitas Islam Indonesia. *Drone Emprit Academic* menggunakan layanan API (*Application Programming Interface*) dari Twitter untuk menangkap percakapan secara semi *realtime* melalui metode *streaming*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-Cov-2 adalah jenis baru dari coronavirus yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Setidaknya dua virus corona diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari, dan masa inkubasi terlama adalah 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang parah dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal bahkan kematian (Mungkasa 2020).

Pada 31 Desember 2020, Kantor Negara WHO China melaporkan pneumonia yang tidak dapat dijelaskan di Kota Huaihan, Provinsi Hubei, China. Pada 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai virus corona jenis baru. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mendeklarasikan kejadian darurat kesehatan masyarakat (KKMMD) yang menjadi perhatian dunia pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.

Dilihat dari penyebaran Covid-19, virus tersebut telah menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia, jumlah kasus dan/atau kematian yang terus meningkat, dan berdampak pada politik, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan dan keamanan negara, Selain masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 2019 Penyakit Virus Corona (Covid-19). Perpres tersebut menetapkan Covid-19 sebagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) dan menetapkan bahwa KKM Covid-19 di Indonesia harus diatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Haryanto 2020).

Perlakuan terhadap KKM dilakukan dengan menerapkan karantina sanitasi di pintu

masuk dan area. Dalam pelaksanaan karantina kesehatan di daerah, setelah melalui kajian yang cukup komprehensif, Indonesia mengambil kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). , tingkat ancaman, efektivitas dan sumber daya yang mendukung sumber daya, teknologi tempur, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan nasional, dan keamanan. Aturan PSBB tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona (Covid-19), dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 pada pedoman Uraian teknis diberikan dalam. Percepatan penanganan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menjadi tugas pemerintah untuk menyusun pedoman pencegahan dan pengendalian tersebut, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka penyelenggaraan sistem kesehatan pertahanan negara. Rekomendasi WHO dan menyesuaikan Perkembangan pandemi Covid-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan satgas merupakan kebijakan pertahanan dan kesehatan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Kebijakan kesehatan pertahanan merupakan regulasi yang dituangkan oleh pemerintah melalui kebijakan pertahanan nasional dan kompetensi ketahanan nasional berdasarkan suatu kewaspadaan menghadapi tantangan global. Kebijakan kesehatan pertahanan memuat otoritas dan peran kesehatan, sebagai bagian dan ruang lingkup ketahanan nasional. Peran kesehatan tersebut mencakup peran strategis, politik dan kultural (Haryanto 2020).

Peran strategis kesehatan pertahanan negara adalah potensi diversifikasi multi fungsi yang sehat untuk memandu tingkat ketahanan negara. Potensi kesehatan sektor pertahanan menggunakan pemikiran strategisnya untuk menggambarkan wilayah geografis Indonesia yang luas dengan karakteristik dan masalah kesehatan yang berbeda berdasarkan peta medis geografis. Adanya dinamika hierarkis masalah kesehatan menjadikan peta medis geografis sebagai alat ukur kebijakan pertahanan dan kesehatan negara. Peta geometris ini nantinya menjadi barometer dampak COVID-19 bagi Indonesia secara keseluruhan.

Kontekstual kesehatan pertahanan dengan sendirinya merupakan salah satu kunci utama untuk membuka setiap gangguan ketahanan nasional yang menjadi tali temali organisasi, struktur, sistem kerja dan jejaring sebagai bagian simpul yang kuat. Mekanisme ini secara idealitas akan menjaga nilai luhur kesehatan pertahanan dan nilai-nilai ketahanan nasional, yang sebaran realitas menapak dan menjejakkan kaki pada titik-titik kelemahan bangsa dan dunia terhadap *Global Health Security Agenda*. Oleh karena itu, pelaksanaan pencegahan dan percepatan penanggulangan Covid-19 melalui gugus tugas tidak dapat hanya dilakukan oleh satu instansi. Perlu adanya koordinasi lintas instansi yang melibatkan banyak pihak agar memaksimalkan peran gugus tugas tersebut.

Agenda Keamanan Kesehatan Global (*Global Health Security Agenda - GHSA*) adalah tantangan global yang menjadi perhatian dunia saat ini. GHSA telah menjadi tarik ulur masalah kesehatan dan keselamatan dunia, dan merambah ke tingkat nasional dan regional di setiap negara. Situasi ini menuntut setiap negara memiliki semangat baru dan mendefinisikan kembali peran dan fungsi ketahanan nasionalnya di bidang kesehatan. GHSA tidak hanya memperhatikan infeksi. Situasi politik, ekonomi, imigrasi, dan perubahan iklim global adalah karakteristik dari struktur keamanan kesehatan dunia. Oleh karena itu, setiap negara mencari dan merumuskan kembali fungsi cepat, deteksi, pencegahan dan respons serta partisipasi masyarakatnya berdasarkan pada karakteristik peta medis lokal.kekuatan. Sebagai kekuatan ketahanan nasional (Widyastuti dan Nugroho 2020).

Fungsi *rapid detect, prevent* dan *respond* inilah kemudian yang menjadi tugas dan

fungsi dari gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 19* (Covid-19). Terjadinya suatu *outbreak* (Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit), tidak hanya berdimensi lokal, namun dapat meluas melewati batas-batas Negara, mengingat sedemikian cepatnya teknologi transportasi yang mendukung perpindahan antar manusia, yang tentunya pada kondisi tertentu “carrier” yang membawa sumber infeksi berpotensi sebagai sumber penularan (Hadi 2020).

Prinsip epidemiologi dalam GHSA adalah cawan besar yang menampung konsep berpikir dan bertindak dari *Rapid-Detect-Respond* dan *Prevent*, sebagai wahana keilmuan yang wajib dimiliki gugus tugas percepatan penanggulangan *corona virus disease 19*. Prinsip keilmuan ini adalah merajut fenomena pemetaan dan pendataan problematika kesehatan masyarakat, yang dirangkum dalam analisis konteks pertahanan dengan tujuan terbentuknya konstruksi bangunan baru, sebagai pendekatan epidemiologi berkarakteristik studi pertahanan.

Rapid adalah langkah cepat dan dinamis mengurai suatu ancaman terjadinya suatu *outbreak*. Pola yang dikembangkan oleh *Rapid*, adalah koneksitas informasi yang tepat waktu, sehingga dapat dibuat keputusan yang dapat memandu manajemen berikutnya dari suatu *outbreak*. *Detect* adalah mekanisme divergen mata berpendar terhadap invasi *outbreak* yang muncul. *Detect* memuat beberapa kemampuan untuk mengurai simpul tali *outbreak* yang kusut menjadi tali temali yang terurai lurus, kemudian ditandai sebagai tali-tali deteksi yang dicelup dalam SOP *outbreak pathway* jalur tatakelola manajemen *outbreak*. Beberapa prinsip dalam *detect* adalah (1) Mendata potensi ancaman dan waktu melaksanakan langkah mitigasi resiko. (2) Deteksi spesies invasif baru (Covid-19). (3) Mencegah penyebaran dan pembentukan spesies invasif permanen. (4) Menempatkan informasi sebagai manajemen keputusan dan *feedback* yang digunakan untuk memandu upaya saat ini dan masa depan.

Respond merupakan sifat dan spirit dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya suatu *outbreak*. Respon tersebut diwujudkan sebagai mekanisme otoritatif, termasuk perencanaan, koordinasi, identifikasi spesies prioritas tinggi dan lokasi berisiko, pemantauan area pencegahan tertentu, pemantauan interaksi faktor lingkungan dan sistem inang, deteksi dan pengumpulan serta pengelolaan data. Sedangkan *prevent* merupakan kebijakan dalam pencegahan agar *outbreak* tidak meluas secara masif dan dapat dikendalikan.

Peran gugus tugas yang semakin vital dalam percepatan penanggulangan penyebaran *virus corona disease 19* (Covid-19) menunjukkan dinamika pembahasan yang terjadi di masyarakat melalui media sosial Twitter. Pembahasan terkait isu corona dan penanggulangannya oleh pemerintah mulai menunjukkan *trending* yang meningkat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) akhir maret 2020.

Inilah kemudian yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini. Isu kesehatan merupakan isu yang menjadi perhatian publik karena merupakan salah satu isu penting yang berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat. Bencana Covid 19 yang menjadi perhatian publik layak untuk diteliti dalam perspektif publik khususnya di media sosial untuk menilai peran pemerintah dalam percepatan penanggulangan *corona virus disease 19* (Covid-19). Ini juga menjadi bentuk partisipasi publik dalam menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19.

Dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19), pemerintah telah membentuk kelompok kerja yang merupakan wujud dari sistem kesehatan pertahanan negara. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Bagi sebagian besar pemerintah di berbagai negara, situasi krisis tidak mudah ditangani. Apalagi di

masa pandemi Covid-19, mengingat sifat bencana yang ditimbulkan oleh wabah ini, dinamika krisis yang terjadi sangat cepat, membutuhkan penilaian harian (Sugihamretha 2020).

Situasi krisis juga dapat dengan mudah memicu ketegangan dan konflik antara aktor pemerintah dan di tingkat masyarakat. Untuk itu, pembuat kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan yang mengurangi potensi konflik akibat situasi krisis. Di antara aktor-aktor pemerintah, mengingat masing-masing aktor memiliki kepentingan yang dapat diperjuangkan dan kekuasaan yang dapat dijalankan secara formal, maka potensi konflik muncul karena adanya kontestasi antara kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dan kelembagaan manajemen krisis yang kuat. Oleh karena itu, kepentingan berbagai lembaga dan departemen dapat berada di bawah satu kepemimpinan dan kebijakan (Wardhana 2020).

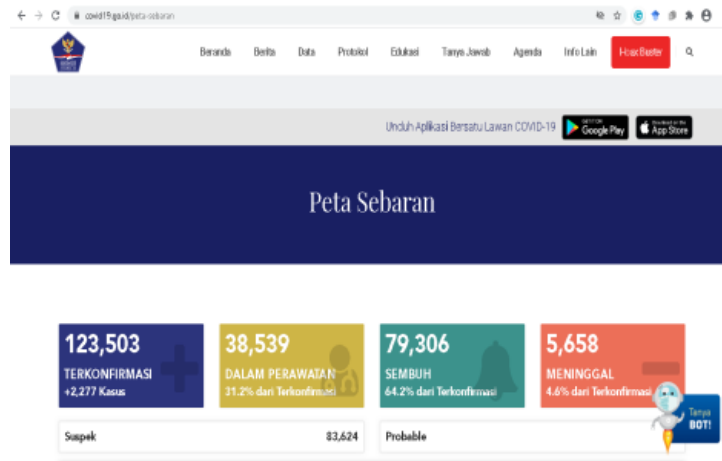
Menyikapi pandemi Covid-19, selain kemauan politik pemerintah yang kuat, juga diperlukan kebijakan tepat guna yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan mewujudkan hak warga negara atas kesehatan dalam situasi krisis seperti saat ini. Akibat keterlambatan respon penyebaran Covid-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan. Dalam sebulan, Presiden merilis 10 produk hukum terkait penanganan pandemi Covid-19 (Muhyiddin 2020).

Sebagai respon awal dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Gugus tugas telah membuat laman informasi percepatan penanganan Covid-19 yang dapat diakses melalui covid19.go.id. Dalam laman tersebut, masyarakat dapat melihat perkembangan informasi melalui akses menu berita, data, edukasi, Tanya jawab, agenda, info lain bahkan dalam rangka mencegah mis informasi dan hoax, dalam laman tersebut juga terdapat menu *hoax buster*. Sedangkan *update* regulasi dan peraturan dapat dilihat di menu peraturan.



Gambar 1. Tampilan laman covid19.go.id

Informasi utama yang kerap menjadi perhatian publik adalah informasi terkait data dan peta sebaran Covid 19 di Indonesia. Dalam laman tersebut publik dapat melihat data secara semi *realtime* yang di *update* perhari agar informasi dapat diberikan secara transparan kepada masyarakat. Harapan dari publikasi data ini adalah sebagai bentuk pemberian informasi yang kredibel sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang *up to date*.



Gambar 2. Peta Sebaran Covid-19

Terjadinya suatu *outbreak* (Kejadian luar biasa/Wabah penyakit) Covid 19 mengakibatkan gugus tugas harus mendefinisikan kembali peran dan fungsi ketahanan nasional bidang kesehatan. Gugus Tugas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menapak dan menjejakkan kaki pada titik-titik kelemahan bangsa dan dunia terhadap *Global Health Security Agenda* (GHSA). Untuk itu gugus tugas memiliki kewajiban dalam mengupayakan dan merumuskan kembali fungsi *rapid, detect, prevent* dan *respond* berdasarkan karakteristik peta geomedik dan kekuatan partisipasi masyarakatnya sebagai kekuatan ketahanan nasional.

Prinsip epidemiologi dalam GHSA terdiri dari *Rapid, Detect, Respond* dan *Prevent*. Gugus tugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berpedoman dalam empat dimensi tersebut sesuai dengan rangka menyelesaikan problematika keamanan kesehatan berupa bencana kesehatan Covid-19.

Rapid

Rapid adalah langkah cepat dan dinamis mengurai suatu ancaman terjadinya suatu *outbreak*. Dimensi *rapid* memuat nilai dan spirit yang mengalir dalam tubuh dengan membawa berbagai komponen energi tubuh (yang sudah melalui pembentukan siklus energi), bernuansa sebagai manifestasi tubuh yang bergerak cepat, mengantisipasi dan menindak setiap problematika invasif ataupun adanya spesies invasif yang memiliki efek resiko dalam penyebaran dan pembentukan spesies invasif permanen. Pola yang dikembangkan oleh *Rapid*, adalah konektivitas informasi yang tepat waktu, sehingga dapat dibuat keputusan yang dapat memandu manajemen berikutnya dari suatu *outbreak*.

Pergerakan cepat dilakukan oleh gugus tugas dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Berdasarkan berita pada laman covid.19.go.id pada tanggal 20 Maret 2020. “Gugus Tugas Berlakukan Rapid Test Massal Identifikasi Penyebaran Covid-19. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto pada Kamis (19/3) di Graha BNPB, Jakarta.

Yulianto menyampaikan bahwa:

“*Screening* massal dengan metode imunoglobulin atau pengukuran antibody di dalam sampel darah ini juga dilakukan oleh banyak Negara terdampak virus corona. Apabila dirinya positif, individu yang telah melakukan *screening* melalui pendekatan ini akan diuji ulang dengan metode tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang jauh lebih akurat”.



Gambar 3. Berita Pemberlakuan Rapid Test

Detect

Detect adalah mekanisme divergen mata berpendar terhadap invasi *outbreak* yang muncul. *Detect* memuat beberapa kemampuan untuk mengurai simpul tali *outbreak* yang kusut menjadi tali temali yang terurai lurus, kemudian ditandai sebagai tali-tali deteksi yang dicelup dalam SOP sebagai *outbreak pathway* jalur tata kelola manajemen *outbreak*. Beberapa prinsip dalam *detect* adalah (1) Mendata potensi ancaman dan waktu melaksanakan langkah mitigasi resiko. (2) Deteksi spesies invasif baru (pandemi covid-19) sebagai basis keputusan yang efisien dan ramah lingkungan. (3) Mencegah penyebaran dan pembentukan spesies invasif permanen. (4) Menempatkan informasi sebagai manajemen keputusan dan *feedback* yang digunakan untuk memandu upaya saat ini dan masa depan.

Berdasarkan informasi dari laman covid.19.go.id pada 29 Maret 2020 bahwa "pemerintah telah memeriksa 6.500 orang tentang Covid-19." Pemerintah Indonesia telah memeriksa sebanyak 6.500 orang untuk Covid-19. Hasil tes tersebut menjadi indikator peningkatan kasus positif. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan juga menunjukkan masih ada kasus positif yang belum diisolasi, sehingga ditemukan angka penularan lebih banyak karena kontak masyarakat yang dekat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Covid 19 sebagai berikut:

“Kita sudah melakukan pemeriksaan pada lebih dari 6.500 orang di dalam kaitannya dengan pemeriksaan ini di mana sekarang kita pahami ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285kasus positif”.

Namun hasil dari deteksi awal tersebut tidak dapat mengurangi penambahan kasus sampai dengan tanggal hari ini. Hal ini memberikan suatu sinyal bahwa mitigasi resiko dalam penyebaran Covid-19 belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Bisa saja hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar satuan gugus tugas pusat dan daerah. Sehingga tidak terjalin komunikasi yang efektif dan efisien.



Gambar 4. Berita Terkait Pemeriksaan Covid-19

Respond

Respond merupakan sifat dan spirit dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya suatu *outbreak*. *Respond* mewujudkan sebagai mekanisme otoritas yang memuat perencanaan, koordinasi, identifikasi spesies prioritas tinggi dan lokasi beresiko, pemantauan area tertentu untuk pencegahan, pengawasan interaksi sistem *agent* dan host lingkungan, deteksi serta pengumpulan dan pengolahan data. Melalui *respond*, dapat dilakukan lokalisasi potensi suatu *outbreak* dan menentukan resiko relatif terkait dengan prioritas terhadap sumber daya lintas batas yurisdiksi, pengobatan, penguraian populasi yang terkena, memulihkan habitat, koordinasi komunikasi publik dan pelatihan terhadap sukarelawan dalam teknik deteksi, identifikasi, pemantauan dan kebijakan lapangan.

Pemerintah melakukan prioritas terhadap tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini sebagaimana diberitakan dalam laman covid19.go.id pada tanggal 30 Maret 2020 dengan judul “Pemerintah Siapkan Pengadaan 191.666 APD dalam Penanganan Covid-19”.

Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 berikut: “Pemerintah telah mengadakan APD sebanyak 191.666 set dan terdistribusi ke seluruh provinsi serta rumah sakit yang membutuhkan”

Hal ini merupakan bentuk respon pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar merespon pandemi Covid-19 secara maksimal. Oleh karena itu, dukungan masyarakat untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak harus menjadi latihan wajib. Pemerintah juga membeli 12.272.500 masker bedah dan 133.640 masker N95 serta 425.000 produk rapid test yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 6. Berita Pengadaan APD

Prevent

Prevent merupakan kebijakan yang termuat dalam *Global Health Security Agenda* (GHSA) dan *IHR (International Health Regulation)* terdiri dari beberapa aspek prioritas. (1) Pencegahan Resistensi Antibiotik, dengan menurunkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Upaya tersebut diantaranya penggunaan antibiotik yang rasional (*appropriate*) dan bertanggung jawab, sistem surveillans untuk mencegah transmisi organisme yang menyebabkan resisten antibiotik, dengan pengendalian dan pencegahan infeksi yang terkontrol dalam suatu kerangka kerja pencegahan AMR (*Antimicrobial Resistance*). (2) Pencegahan penyebaran penyakit zoonosis yang muncul dengan mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya kembali penyakit zoonosis melalui *emerging dan reemerging infectious diseases*, meningkatkan pengawasan untuk penyakit zoonosis baru dan mempromosikan praktik aman dalam produksi ternak dan pemasaran hewan. (3) Mempromosikan *biosafety* dan *biosecurity* nasional dengan mengembangkan pendekatan multisektoral untuk mengelola bahan-bahan biologis, termasuk mengidentifikasi, mengamankan, memantau, dan menyimpan patogen berbahaya dalam jumlah minimum terhadap fasilitas, dengan kerangka kerja untuk memajukan perilaku penelitian yang aman dan bertanggung jawab. (4) Mengurangi jumlah dan besarnya wabah penyakit menular dengan menetapkan program yang efektif untuk vaksinasi terhadap penyakit yang rentan epidemi dan pengendalian infeksi nosokomial sebagai kemampuan fungsional pengendalian infeksi. (5) Deteksi Ancaman Lebih Awal GHSA, menyerukan agar negara-negara mengembangkan kapasitas untuk deteksi dini, karakterisasi, dan pelaporan biologis transparan terhadap berbagai ancaman, dengan memperkuat, dan menghubungkan jaringan global untuk *real-time "biosurveillance"*

Seperti dilansir laman covid19.go.id pada 3 April 2020, Gugus Tugas juga melakukan langkah preventif dengan menambah jumlah fasilitas pemeriksaan dan pengujian Covid-19. Hal ini untuk mengetahui dan mengungkap penyebaran SARS-CoV-2 agar dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin dan dengan cara yang terbaik.

Menurut data hingga saat ini sudah ada 48 laboratorium yang beroperasi dengan kapasitas masing-masing dan telah memeriksa sebanyak 7.924 spesimen Covid-19 dari 32 Provinsi, termasuk di dalamnya 120 kabupaten/kota. Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh juru bicara penanggulangan Covid-19 sebagai berikut:

“Kita akan perbanyak lagi fasilitas penguji untuk pemeriksaan Covid-19. Seperti diketahui sudah ada 48 laboratorium yang beroperasi, tentunya dengan kapasitas masing-masing”.



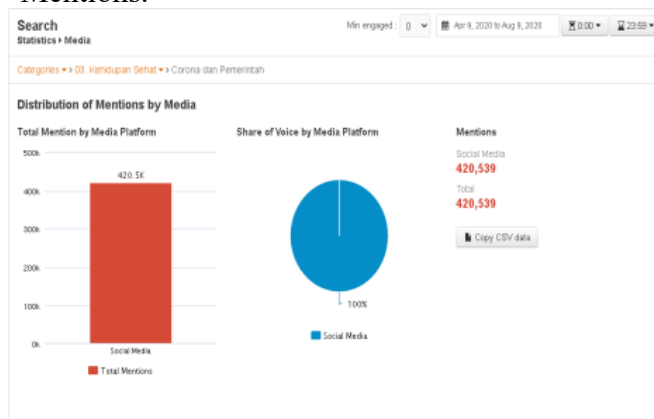
Gambar 7: Berita Memperbanyak Fasilitas Uji

Berdasarkan hasil analisa media sosial melalui laman web satuan gugus tugas penanganan Covid-19 yaitu covid19.go.id dari mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 03 April 2020 didapatkan simpulan bahwasannya gugus tugas telah melakukan Prinsip epidemiologi dalam *Global Health Security Agenda* meliputi *Rapid, Detect, Respond* dan *Prevent*. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana respon publik terkait aktivitas yang telah dilakukan satuag gugus tugas tersebut, bagaimana reaksi publik dan sentiment yang diberikan?

3.1. ANALISIS DEA

A. Volume dan Tren

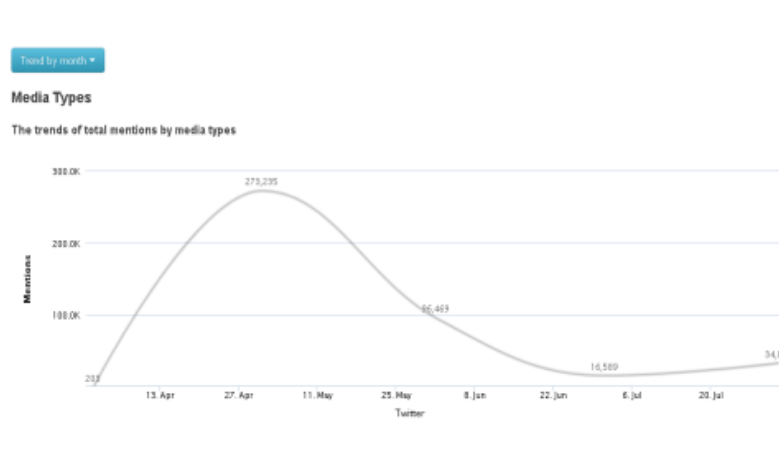
Total percakapan yang menggunakan *keyword* “Corona” dan “Pemerintah” pada periode 09 April sampai dengan 09 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB tampak pada gambar 8 yang mencapai 420.539 Mentions.



Gambar 8. Distribution of Mentions by Media

Mentions tren tertinggi berdasarkan gambar 9 terjadi pada tanggal 1 Mei 2020 dengan total 273.235 dan 1 Juni 2020 dengan total 96.469 mentions. Terlihat juga pada gambar bahwasannya para pengguna Twitter sudah mulai ramai membahas Corona dan Pemerintah pada tanggal 1 April 2020 dengan jumlah mentions mencapai 203 dan mulai menurun pada 1 juli dengan 16.589 mentions kemudian bergerak naik kembali di tanggal 1 Agustus 2020 dengan total mention 34.042

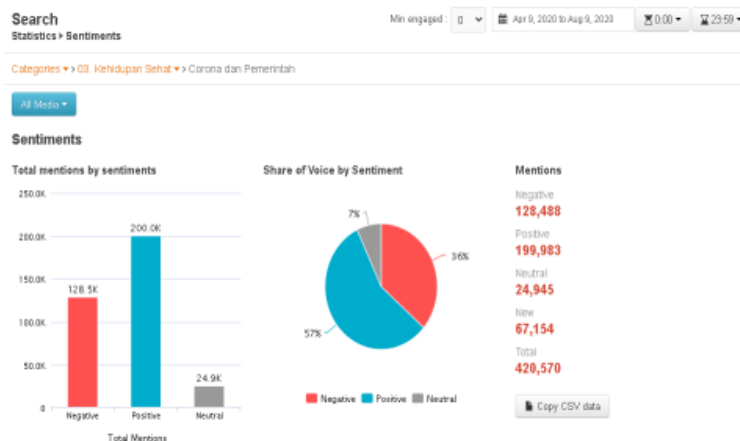
Hal ini menunjukkan bahwasannya warganet memiliki *aware* yang tinggi terhadap aktivitas satuan gugus tugas penanganan covid-19 dalam mencegah semakin meluasnya wabah dan mengedukasi publik melalui media terkait, dengan demikian publik dapat berpartisipasi aktif dalam menilai kinerja pemerintah dalam hal ini “satuan gugus tugas”.



Gambar 9. Tren Percakapan

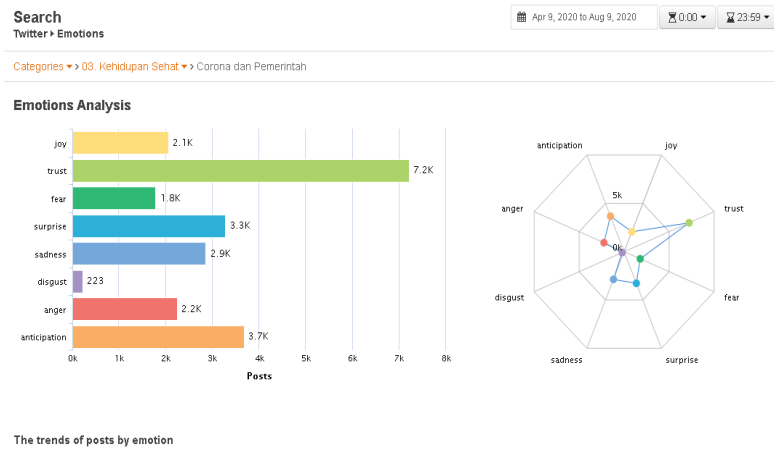
B. Sentimen

Salah satu hal yang menarik untuk dinantikan saat menganalisis media sosial adalah melihat sentimen publik (netizen) atau netizen terhadap topik yang sedang dianalisis. Emosi bisa positif atau konstruktif, negatif atau destruktif, atau dianggap netral. Emosi positif atau negatif akan mempengaruhi pandangan dan pola opini publik tentang topik menonton.



Gambar 10. Total Mentions by sentiments

Berdasarkan periode 09 April 2020 sampai dengan 09 Agustus 2020, sekitar 57% atau 199.983 mentions yang diberikan warganet adalah sentiment positif dan 36% atau 128.488 mentions yang diberikan adalah sentiment negatif. Hal ini menunjukkan bahwa warganet memberikan apresiasi yang positif atas kinerja pemerintah melalui satuan gugus tugas dalam penanganan penyebaran Covid-19. Ini terlihat juga dalam analisa emosi pada gambar 11 yang menunjukkan *trust* atau kepercayaan adalah topik yang paling dominan dengan jumlah 7213 mentions.

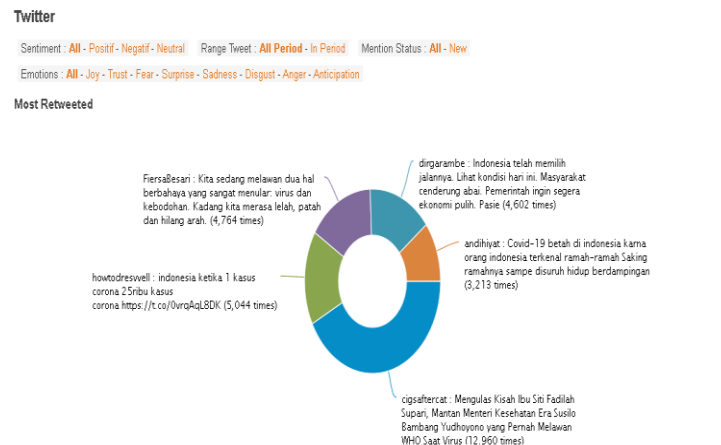


Gambar 11. Emotions Analysis

C. Top Influencer




Top influencer “Corona” dan “Pemerintah” didominasi oleh akun digital news @CNNIndonesia dengan total 9.531 engagements serta @detikcom dengan total 6.630 engagements. Hal inilah yang menyebabkan topik ini lebih menghasilkan sentiment yang positif daripada negatif.

Namun dalam *Top Users By Engagement*, akun personal lebih didominasi oleh sentiment positif dari pada negatif. Hal ini sebagaimana akun @cigsaftercat yang mengulas kisah Ibu Siti Fadilah Supari, Mantan Menteri Kesehatan Era Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah melawan WHO saat virus Flu Burung melanda Indonesia tahun 2005. Akun lain adalah @FiersaBesari yang menyuarakan “kita sedang melawan dua hal berbahaya yang sangat menular: virus dan kebodohan. Kadang kita merasa lelah, patah dan hilang arah. Kadang kita ingin berkata, “Indonesia terserah. “Tapi tolong jangan menyerah”. Negeri ini membutuhkanmu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, Kawan-Kawan” dalam cuitannya.



Gambar 12. Most Retweet

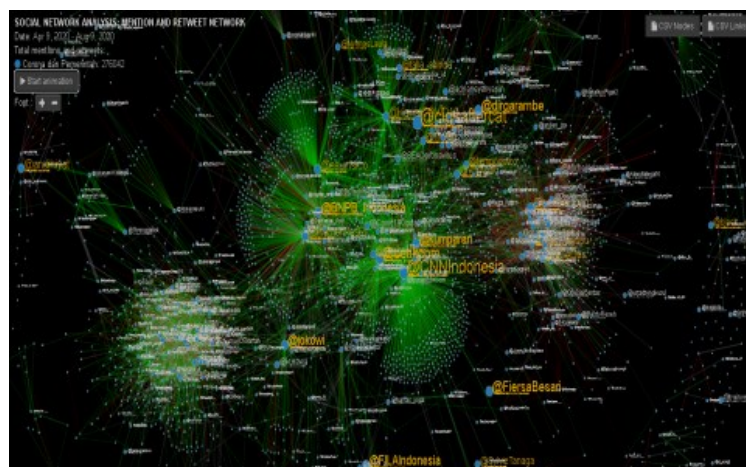
Pada tabel 12 terkait *most retweet* terdapat 3 besar akun yang mendapatkan jumlah retweet terbanyak. Akun-akun ini merupakan aku personal yang memberika kesan positif serta negatif terhadap topik yang diangkat. Tiga akun tersebut antara lain: @cigsaftercat; @howtodresvvel dan @FiersaBesari. Dari ketiga akun itu jumlah follower terbanyak adalah akun @FiersaBesari. Adapun akun yang memberikan kesan negarif tampak pada cuitan akun @dirgarambe.

Avatar	User	Status	#Followers	#Retweeted	All Time	Sentiment
	sat @cigasatercat	Mengulas Kisah Ibu Siti Fadiah Supari, Mantan Menteri Kesehatan Era Susilo Bambang Yudhoyono yang Pemah Melawan WHO Saat Virus Flu Burung Melanda Indonesia Tahun 2005 - Sebuah Utas - https://t.co/dmNSBk2Mv 🕒 22/May/2020 10:27 WIB LatGraph	2,625	12,960	👁️ 42,588 ❤️ 97,496	Positive 53.54 % Edit
	?? @howtodreswell	Indonesia ketika 1 kasus corona 25ribu kasus corona https://t.co/DwqAqL8DK 🕒 7/Jun/2020 21:49 WIB LatGraph	9,531	5,044	👁️ 21,559 ❤️ 52,445	Positive 70.26 % Edit
	Dirga Sakti Rambe @dirgarambe	Indonesia telah memilih jalannya. Lihat kondisi hari ini. Masyarakat cenderung abai. Pemerintah ingin segera ekonomi pulih. Pasien #COVID19 trs bertambah. Pukulan berat bagi petugas kesehatan yg berguag dng taruhan nyawa. Waktu yg akan menjwb, apa konsekuensi dr pilihan kita. https://t.co/UKP5LypKAc 🕒 30/May/2020 10:40 WIB LatGraph	69,764	4,602	👁️ 16,217 ❤️ 27,491	Negative 98.44 % Edit

Tabel 1. Most Retweet

D. Social Network Analysis

Berdasarkan peta SNA dengan *keyword* corona dan pemerintah, terlihat kluster besar dengan akun @FiersaBesari dengan sentiment positif mendominasi cluster ini. Akun-akun digital news juga tampak memiliki kontribusi positif dalam cluster ini antara lain @CNNIndonesia, @kumparan. Sedangkan akun instansi pemerintah yang berkontribusi adalah @BNPB_Indonesia dan @KemenkesRI. Sejatinya memang dua akun resmi instansi tersebutlah yang memiliki peran strategis dalam satuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.



Gambar 14. Social Network Analysis (SNA)

Berdasarkan hasil analisis terkait percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 sebagai implementasi sistem kesehatan pertahanan Negara ditinjau dari aspek media sosial memberikan suatu kesimpulan bahwa publik merespon secara positif atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini satuan gugus tugas terkait percepatan penanggulangan corona virus disease 19 (Covid-19)

Trust atau kepercayaan yang telah dibangun tersebut diharapkan dapat terjaga sehingga publik memiliki asumsi yang positif bahwa pemerintah benar-benar fokus dan serius dalam menghadapi bencana covid-19. Dengan demikian komunikasi dua arah dapat terbangun yang pada akhirnya saling bersinergi satu sama lain dalam mencari formula yang tepat terkait percepatan penanggulangan *corona virus disease* 2019 (Covid 19).

4. SIMPULAN

Bencana Covid-19 merupakan suatu bencana kasat mata yang dapat meluluhlantakkan segalanya. Untuk itu perlu dilakukan suatu mitigasi terhadap penyebaran virus melalui institusi lintas instansi. Indonesia dalam memonitoring perkembangan wabah melakukan suatu upaya terpadu melalui satuan gugus tugas covid-19. Gugus tugas tersebut merupakan suatu bentuk manifestasi dalam pengimplementasian sistem kesehatan pertahanan Negara.

Dalam sistem pertahanan, negara juga harus mempertimbangkan semua aspek dari Global Health Security Agenda (GHSA). Untuk itu, Gugus Tugas berkewajiban mengupayakan dan merumuskan kembali fungsi-fungsi rapid, detect, prevent dan respond berdasarkan karakteristik peta medis geografis dan peran serta masyarakat sebagai kekuatan ketahanan nasional..

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam kerangka percepatan penanganan virus covid-19 satuan gugus tugas telah melaksanakan segala tugas fungsinya. Hal ini pada akhirnya memberikan suatu sentiment positif oleh publik yang dalam hal ini merupakan warganet (Netizen)

REFERENCES

- Creswell, Jhon W. 2016. *Reserach Design*. California: SAGE Publication.
- Hadi, Suprayoga. 2020. “Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional Terhadap Bencana.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 177–90. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109>.
- Haryanto. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 151–65. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.114>.
- Modjo, M Ikhsan. 2020. “Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 103–16. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117>.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.S Nasir. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhyiddin. 2020. “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 240–52. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Mungkasa, Oswar. 2020. “Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 126–50. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>.
- Nugroho, Hanan. 2020. “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) Di Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 117–25. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>.
- Sugihamretha, I Dewa Gde. 2020. “Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 191–206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>.
- Wardhana, Dharendra. 2020. “Kajian Kebijakan Dan Arah Riset Pasca-Covid-19.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 223–39. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.110>.
- Widyastuti, Nur Laila, and Hanan Nugroho. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Industri Minyak Dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan Untuk Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 166–76. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.116>.